

RINGKASAN

Nur Lia Afriani
220510140

Proses Penyidikan Terhadap Tidak Pidana *Human Trafficking* Dengan Modus *False Job Recruitment* Dan Eksploitasi *Love Scamming* Di Luar Negeri (Studi Penelitian Di Kepolisian Daerah Aceh)
(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M., dan Johari, S.H., M.H.)

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan terus berkembang melalui berbagai modus, seperti *false job recruitment* dan eksploitasi *love scamming* di luar negeri. Secara normatif, perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, praktiknya masih terjadi akibat pemanfaatan teknologi digital, rendahnya informasi masyarakat, dan jaringan kejahatan lintas negara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan Polda Aceh terhadap pelaku *human trafficking* serta efektivitas penerapan hukuman dalam mencegah tindak pidana serupa.

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Aceh. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta bahan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Proses tersebut meliputi penerimaan laporan atau informasi, pemeriksaan korban dan saksi, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan pihak yang diduga terlibat, hingga penyelesaian berkas perkara. Dalam pelaksanaannya, penyidik menghadapi kendala dalam memperoleh keterangan korban, mengidentifikasi pelaku, menelusuri bukti elektronik, serta menangani perkara yang berkaitan dengan pihak di luar negeri. Penggunaan alat bukti dalam penyidikan mengacu pada Pasal 184 KUHAP dan informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk mendukung pengungkapan tindak pidana.

Disarankan agar Polda Aceh meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait, memperkuat kemampuan penyidikan berbasis teknologi digital, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang dengan modus pekerjaan palsu dan *love scamming*.

Kata Kunci : Tindak Pidana, *Human Trafficking*, *False Job Recruitment*, *Love Scamming*, Polda Aceh.

SUMMARY

Nur Lia Afriani *Investigation Process Regarding the Crime of Human Trafficking Involving False Job Recruitment and Love Scamming Exploitation Abroad (A Study at the Aceh Regional Police)*
220510140 **(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M., and Johari, S.H., M.H.)**

Human trafficking is a crime that violates human rights and continues to evolve through various methods, such as fake job recruitment and love scams abroad. Normatively, legal protection is regulated by Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking. However, its practice persists due to the use of digital technology, low public information, and transnational criminal networks. This indicates a gap between the rule of law and its implementation. This study aims to determine the form of criminal accountability applied by the Aceh Regional Police to perpetrators of human trafficking and the effectiveness of punishment in preventing similar crimes.

This study uses an empirical juridical approach with a legislative approach and a case study approach. The research was conducted through library research and field research at the Aceh Regional Police. Data was obtained through interviews with relevant parties and legal materials.

Research findings indicate that the investigation process is conducted through preliminary inquiry and formal investigation stages, in accordance with applicable legal provisions. This process encompasses the receipt of reports or information, the questioning of victims and witnesses, the gathering of evidence, the interrogation of suspected parties, and the finalization of the case file. During execution, investigators encounter obstacles in obtaining victim statements, identifying perpetrators, tracing electronic evidence, and handling cases involving parties located abroad. The use of evidence in the investigation relies on Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHP) and electronic information—as regulated by Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions—to facilitate the resolution of criminal cases.

It is recommended that the Aceh Regional Police improve coordination with relevant institutions, strengthen digital technology-based investigative capabilities, and increase public education regarding the dangers of human trafficking using the methods of false job recruitment and love scamming.

Keywords: *Criminal Offense, Human Trafficking, False Job Recruitment, Love Scamming, Aceh Regional Police.*